

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Komunikasi merupakan aktifitas manusia yang sangat penting. Bukan hanya dalam kehidupan organisasi, namun dalam kehidupan manusia secara umum. komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara yang sederhana sampai yang kompleks, dan teknologi kini telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara drastis.

Komunikasi tidak terbatas pada kata-kata yang terucap belaka, melainkan bentuk dari apa saja interaksi, senyuman, anggukan kepala yang membenarkan hati, sikap badan, ungkapan minat, sikap dan perasaan yang sama. Diterimanya pengertian komunikasi yang sama adalah merupakan kunci dalam komunikasi.

Peran komunikasi sangatlah penting dalam suatu proses kegiatan di dunia ini. Salah satunya dalam lembaga pemerintah, peran komunikasi penting dalam sebuah proses penyaluran pesan ataupun gagasan dalam sebuah penyuluhan program-program yang ingin diberikan dari pemerintah kepada masyarakat. Komunikasi menurut Efendy, (2005:61) adalah penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Komunikasi Dalam Organisasi juga sangat berpengaruh untuk menciptakan sebuah komunikasi yang baik serta mampu untuk mengambil dan mendapatkan dukungan dari luar organisasi. Atas dasar itulah, Komunikasi Organisasi harus memiliki beberapa strategi komunikasi yang sesuai dengan etika komunikasi organisasi. Strategi ini akan membantu

Peran Komunikasi dalam Organisasi untuk menciptakan suasana pertukaran informasi yang lebih santai, lebih cair serta suasana komunikasi menjadi terasa hangat. Strategi komunikasi menurut Rogers adalah suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar melalui ide-ide baru.

Menurut DeVito (2013:17), strategi komunikasi adalah penerapan beberapa rencana untuk mengontrol orang lain melalui interaksi komunikasi, biasanya dengan cara memanipulasi dan memberikan dorongan sikap defensif. Pada dasarnya, strategi komunikasi sangat penting untuk proses suatu kegiatan. Strategi komunikasi diperlukan di entitas pemerintah dalam hal menyebarkan pesan dan ide atau dalam hal layanan konseling yang ditawarkan pemerintah kepada publik.

Pemilihan strategi komunikasi merupakan isu krusial yang perlu ditangani dengan matang karena hasil keputusan yang buruk dapat menjadi bencana dalam hal waktu, uang, dan energi yang terbuang. Gagasan strategi komunikasi digunakan dalam konteks ini sebagai bagian dari strategi komunikasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Namun, pada tingkat makro, strategi tidak lebih dari pengetahuan komunikasi untuk jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asti Respita (2021:51) bahwa Strategi komunikasi yang direncanakan oleh Dinas Sosial Makassar telah dilaksanakan melalui beberapa tahap sesuai teori strategi komunikasi seperti menentukan khalayak, bagaimana menyusun pesan, menetapkan metode yang digunakan serta menyeleksi penggunaan media cetak maupun elektronik.

Sedangkan menurut Tedi Setiadi Wiranata dalam penelitiannya adalah strategi komunikasi yang direncanakan oleh Dinas Sosial Kota Cilegon sesuai dengan perumusan strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Anwar Arifin seperti mengenal sasaran, strategi menyusun pesan menetapkan metode penyampaian pesan. (Skripsi)

Pandangan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman yaitu komunikasi non verbal. Komunikasi non verbal adalah proses komunikasi yang tidak menggunakan lambang verbal atau isyarat yang bukan kata, baik lisan maupun tulisan. Salah satunya non verbal yang menimbulkan kesalahpahaman yaitu komunikasi antar anak disabilitas sensorik tuna wicara.

Disabilitas sensorik adalah penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Penyandang disabilitas adalah obyek yang harus dikasihani dan dianggap tidak mampu atau hanya sebagai penghambat harus dihilangkan, anggapan-anggapan tersebut perlahan harus dikikis.

Komunikasi antar anak disabilitas dengan masyarakat dikontrol oleh Dinas Sosial Kota Cirebon, Dinas sosial bagi masyarakat memiliki peran penting yaitu sebagai wadah penyaluran bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, seperti yang telah ditetapkan dalam UU No. 8 Tahun 2016 tentang kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia hidup dalam masyarakat.

Setiap manusia yang lahir di dunia berharap menjadi manusia yang sehat, utuh tanpa kekurangan pada bagian fisiknya, terutama di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar. Keadaan sehat seseorang yang sebelumnya akan berubah jika kehilangan salah satu bagian tubuh karena kecelakaan atau sebab lain. Anggota keluarga khawatir tentang kesehatan mereka di masa depan.

Penyandang disabilitas digambarkan dalam UUD No. 8 Tahun 2016 sebagai siapa saja yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik jangka panjang dan yang menghadapi tantangan dan hambatan partisipasi ketika berinteraksi dengan lingkungan. Penyandang disabilitas merupakan istilah yang merujuk kepada orang-orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental. Penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama kelompok kelainan fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok orang dengan berbagai gangguan, khususnya mereka yang merujuk kelainan yang terkait dengan berbagai jenis kondisi.

Anak disabilitas tunarungu wicara di dalam menjalani kehidupannya ketika mereka melakukan proses komunikasi sehari-harinya memiliki perbedaan dengan anak-anak normal pada umumnya. Anak tunarungu dan wicara mengalami perbedaan komunikasi dikarenakan kemampuan mereka di dalam pendengaran dan mengucapkan sesuatu atau melakukan komunikasi yang terbatas, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam mengucapkan suatu hal dengan baik dan jelas pada saat melakukan proses komunikasi dengan lawan bicaranya. Penyesuaian karakter pada anak disabilitas tunarungu dan wicara ini dengan kebutuhan yang

harus diterima menjadi hambatan yang berbeda dari masing-masing pihak. Hambatan tersebut akan terlihat lebih kompleks dan dikatakan khusus didalam pelaksanaannya dibandingkan dengan anak yang penyandang disabilitas lainnya.

Menurut sensus penduduk tahun 2010, terdapat 10,6 juta penyandang disabilitas yang tinggal di Indonesia (KKBPMK RI, 2015). Penyandang disabilitas menghadapi berbagai kesulitan, seperti masalah keuangan dan sosial yang membuat mereka sulit untuk mendaftar sekolah atau mencari pekerjaan. Tekanan dari orang-orang di sekitar penyandang disabilitas adalah hal biasa; biasanya dimulai dengan keluarga mereka sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka memiliki kapasitas dan hak, penyandang disabilitas dapat berkontribusi pada pertumbuhan. Namun, karena kebijakan yang dirancang dengan buruk, ekstensif, dan bias, seringkali berisiko menjadi rentan.

Asumsi bahwa penyandang disabilitas dapat berkembang dan memperoleh pendidikan seringkali tidak hadir atau ditanamkan oleh anggota keluarga. Pemberdayaan harus mampu mengubah pola pikir anggota keluarga yang tidak penyandang disabilitas sehingga mampu mendidik dan memahami dengan baik anggota keluarganya yang penyandang disabilitas. Keluarga yang seharusnya beranggotakan penyandang disabilitas ternyata tidak mendukung tumbuh kembang penyandang disabilitas. Menurut Amaliah (2016:14), Sebagai anggota kemanusiaan dan warga negara Indonesia, penyandang disabilitas diberikan kedudukan hukum dan hak yang sama dengan penduduk Indonesia lainnya.

Hak warga negara yang menyandang disabilitas tidak lebih dan tidak kalah pentingnya dengan hak orang lain yang tidak menyandang disabilitas. Dengan

negara dan pemerintah bertugas menegakkan, membela, dan menjamin hak asasi setiap warga negara dan penduduk tanpa memandang statusnya sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, mereka yang difabel memiliki hak atas budaya, untuk memilih jalan hidup mereka, dan untuk menggunakan hak-hak mereka. Penyandang disabilitas yang berhak atas kesempatan yang sama dengan individu non-difabel juga berhak atas pemberdayaan.

Dalam UU No. 19 Tahun 2011. Oleh karena itu Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan konvensi dan menyampaikan laporan tentang hak-hak penyandang disabilitas di semua bidang masyarakat dan dalam sarana kehidupan mereka. Salah satu bentuk berdaya bagi masyarakat penyandang disabilitas adalah adanya kesempatan untuk menentukan kebutuhan mereka sendiri, jadi melibatkan mereka sebagai subyek yang ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi sampai tahap evaluasi suatu kebijakan program dapat berdampak positif bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Komunikasi antar masyarakat dengan anak disabilitas masih perlu diteliti maka dari itu peneliti memilih judul “ Strategi Komunikasi Dalam Program Bantuan Pada Anak Disabilitas Sensorik Di Panti Asuhan Mekar Arum Kota Cirebon” “.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk dapat mempermudah penelitian ini nantinya dan agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta dan data kedalam penulisan skripsi, maka terlebih dahulu dirumuskan permasalahan yang akan

diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh panti pada anak disabilitas sensorik ?
2. Bagaimana faktor penghambat strategi komunikasi pada anak disabilitas sensorik di panti asuhan mekar arum?
3. Bagaimana upaya mengatasi faktor penghambat strategi komunikasi pada anak disabilitas sensorik di panti asuhan mekar arum?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan dalam menangani anak penyandang disabilitas sensorik.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat strategi komunikasi pada anak penyandang disabilitas
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi faktor penghambat strategi komunikasi pada anak disabilitas sensorik

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, yaitu sebagai referensi bagi peneliti lain dalam kerangka pengembangan bidang ilmu komunikasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan memberikan wawasan baru.

2. Secara praktis, yaitu dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat dan juga bagi pihak panti tentunya, dan bagi orangtua anak penyandang disabilitas dalam pelaksanaan penelitian ini tentu saja diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat secara praktis.



